

### **BAB III**

## **FAKTOR-FAKTOR INTERNAL JEPANG DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESIA**

Pembangunan ekonomi Jepang pada periode pasca perang bisa dibilang sebagai suatu keajaiban secara berkelanjutan. Kebangkitan Jepang dari kehancuran dan kekalahan dalam Perang Dunia II menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat adalah suatu kenyataan yang tidak ada bandingannya dan suatu pencapaian yang mengagumkan. Meskipun dalam perkembangannya Jepang juga mengalami kendala-kendala ekonomi, bukti sejarah tetap patut menjadi contoh penting atas suksesnya bentuk pembangunan ekonomi yang dipimpin negara (*state-led economic development*). Pola pembanguna demikian sebenarnya bertentangan dengan paham Barat, tetapi justru menjadi contoh model pembangunan bagi beberapa negara di kawasam Asia Timur.

Kekalahan Jepang dalam PD II yang kemudian disusul oleh pendudukan AS menanamkan pengaruh yang mendalam serta berkesinambungan pada karakter Jepang. AS tidak hanya memberikan konstitusi bari bagi Jepang yang mempertahankan ide bahwa Jepang adalah negara non-agresif, tetapi AS juga

adalah pemain utama yang strategis dalam ekonomi kapitalis dunia. Sementara, AS tidak mampu menghilangkan struktur korporasi yang khas Jepang dan tidak mampu menanamkan praktik-praktik birokrasi yang dianut oleh AS. Bahkan, Jepang mampu mengambil manfaat dari situasi Perang Dingin. Pecahnya Perang Korea pada tahun 1950 justru menjadi katalisator penting bagi rekonstruksi pondasi industri Jepang.

Perang Korea dapat dikatakan gerbang awal bagi restrukturisasi industri Jepang pada perkembangan ekonomi Jepang selanjutnya secara cepat sehingga mampu melakukan ekspansi modal berupa investasi secara tajam di kawasan Asia. Satu hal yang mencirikan kebijakan Jepang, baik dalam pendekatan pro-aktif maupun yang reaktif, adalah keinginan yang luar biasa untuk mempertahankan kemandirian dan memperkuat keamanan ekonominya semaksimal mungkin.

### **A. Perekonomian Jepang**

Jepang merupakan negara yang menyandang perekonomian terbesar kedua setelah Amerika Serikat, dengan PDB nominal sekitar AS\$ 4.5 triliun, dan perekonomian terbesar ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina dalam keseimbangan kemampuan belanja. Seperti di bab sebelumnya, terlihat bahwa industri utama di Jepang adalah sektor perbankan, asuransi, real-estate, retail, transportasi, telekomunikasi, dan konstruksi. Jepang juga memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif,

kimia, tekstil, dan pengolahan makanan. Sebesar tiga perempat PDB Jepang berasal dari sektor jasa, sehingga sektor jasa dapat dikatakan sebagai sektor andalan ekonomi Jepang.

Dalam indeks Kemudahan Berbisnis, Jepang menempati peringkat ke-12, dan termasuk salah satu negara maju dengan birokrasi paling sederhana. Kapitalisme model Jepang memiliki sejumlah ciri khas. Misalnya saja Keiretsu, suatu grup usaha beranggotakan perusahaan-perusahaan yang saling bekerjasama dalam berbisnis dan memiliki pasar saham. Dalam bidang Ketenagakerjaan, Jepang melakukan negosiasi upah serta perbaikan kondisi kerja antara manajemen dan serikat buruh dilakukan setiap awal musim semi. Dalam indeks Kebebasan Ekonomi, Jepang menempati urutan ke-5 paling *laissez-faire* di antara 41 negara Asia Pasifik.

Ekonomi Jepang mengutamakan efisiensi dan kompetensi guna memacu peningkatan kualitas industri yang berorientasi ke perdagangan internasional. Kolaborasi antara pemerintahan dan pebisnis, etos kerja yang produktif, penguasaan teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia, dan alokasi anggaran yang kecil untuk pertahanan (1% dari PDB) merupakan faktor-faktor yang menyebabkan Jepang berkembang pesat sehingga menjadi salah satu negara yang mampu mengimbangi perekonomian Amerika Serikat.<sup>34</sup> Jepang mengutamakan kualitas produknya dibandingkan dengan kuantitas sehingga konsumen banyak yang merasa puas dengan produk Jepang.

Ekonomi Jepang dapat berkembang pesat juga karena adanya kemitraan antara bank komersi dengan dunia industri riil yang dikenal dengan Keiretsu. Keiretsu merupakan grup usaha yang terbesar di Jepang dan satu-satunya pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan. Keiretsu juga menjamin ketersediaan kesempatan kerja untuk hampir sepertiga angkatan kerja di Jepang, selain itu, keiretsu juga menjamin karir pekerjanya sepanjang hayat (shushin koyo).<sup>35</sup> Adanya jaminan karir tersebut memicu produktivitas pekerja, karena apabila produktivitas menurun dan kesalahan dilakukan maka ancamannya adalah pemutusan hubungan kerja.

Jepang adalah negara terkaya di Asia dan negara terkaya kedua di dunia. Sejak awal 1970-an, Jepang telah menjadi sebuah kekuatan ekonomi global yang mampu berkompetensi dengan Amerika Serikat. Jepang adalah salah satu dari lima negara penyumbang terbesar kepada IMF dan Bank Dunia.

## **B. Politik Perdagangan Internasional Jepang**

Pasca krisis moneter tahun 1997-1998, sejumlah negara-negara Asia Tenggara sedikit demi sedikit berhasil bangkit dari keterpurukan ekonominya berkat aliran modal asing yang masuk. Krisis tersebut dimanfaatkan oleh para elit keuangan Jepang dan para pebisnis Jepang yang tentu didukung oleh pemerintah untuk melakukan investasi di negara-negara Asia Tenggara yang sedang membutuhkan modal asing. Di lain pihak, melajunya kekuatan

<sup>35</sup> Nurhadi Suchayo, "Menuju Indonesia yang Lebih Inovatif," <http://www.ppi->

ekonomi Cina membuat pemerintah dan pebisnis Jepang kian ekspansif dalam melakukan kerjasama ekonominya dengan negara-negara Asia Tenggara. Hal demikian membuat Jepang turut bersikap aktif guna mengimbangi peranan Cina dalam perekonomian di Asia Tenggara.

Sudah barang tentu dengan meningkatnya pengaruh Cina di Asia Tenggara, membuat Jepang harus meningkatkan kredibilitasnya dalam hal politik luar negerinya di Asia Tenggara. Maka dari itu, Jepang-pun kian aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan regional Asia Tenggara, misalnya bergabung dengan ASEAN+3 yang merupakan forum kerjasama antara ASEAN dengan tiga negara Asia Timur, yakni China, Jepang, dan Korea Selatan.

Dengan beredarnya banyak produk Cina yang masuk di pasar Asia Tenggara, dan tingginya kredibilitas Cina dalam melakukan kerjasama-kerjasama regional. Maka dari pihak Jepang untuk mengimbangi kredibilitas Cina tersebut, ditingkatkanlah investasi Jepang ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kepentingan nasional Jepang untuk meningkatkan kredibilitasnya di Asia Tenggara merupakan faktor politik yang membuat Jepang meningkatkan investasinya di sejumlah negara.

Mengingat faktor sejarah yang mengemukakan negatifnya citra Jepang

terhadap negara bekas jajahannya. Investasi Jepang merupakan salah satu cara guna menarik simpati eks-koloni yang dahulunya pernah dijajah oleh Jepang.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, Jepang telah menjadi sebuah pasar ekspor bagi komoditas Indonesia serta merupakan sumber investasi terbesar di Indonesia, sebagaimana akan digambarkan pada bab selanjutnya. Jepang merupakan negara yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebagai negara dengan perekonomian terkuat di Asia Pasifik, mewakili dua-pertiga total PDB Asia Pasifik, Jepang telah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi kawasan Asia Pasifik. Bukan hanya menjadi investor terbesar di Indonesia, tetapi Jepang juga merupakan investor terbesar di kawasan Asia Pasifik. Jepang adalah sumber bantuan pembangunan bilateral yang penting bagi negara berkembang di Asia Tenggara, dan merupakan pasar ekspor yang besar bagi banyak negara Asia.<sup>36</sup>

Perdagangan ASEAN-Jepang bernilai US\$ 122,9 miliar tahun 2002, sebelumnya Jepang memasok 60% dari total bantuan pemerintahan dunia pada tahun 2001.<sup>37</sup> Keahlian teknis Jepang yang terampil, kekuatan keuangannya, dan strategi inovatifnya yang didukung oleh pengalaman pembangunan yang maju akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia tentunya.

---

<sup>36</sup> Kompas, *Jepang tak akan Tinggalkan Indonesia*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0007/19/nasional/jepa07.htm>, diakses tanggal 2 Oktober 2013.

<sup>37</sup> New Sindo, ASEAN-Jepang Sepakat Bahas Perdagangan Bebas, 13 Oktober 2013.

**1. Bilateral: *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)* dan *Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA)***

ASEAN dan Jepang selama bertahun-tahun merupakan mitra dagang yang penting dan terus memperdalam dan memperluas hubungan dagang mereka. Hal ini tercermin dari angka perdagangan yang meningkat terus dengan data terakhir US\$173, miliar tahun 2007 menjadi US\$211,9 miliar tahun 2008, yang berarti naik 22,1%. Sebagai pasar penting bagi produk ASEAN, ekspor ASEAN ke Jepang juga meningkat 22,8%, dari US\$85,1 miliar tahun 2007 menjadi US\$104,8 miliar tahun 2008. Pada periode yang sama, impor ASEAN dari Jepang naik 12,4%, dari US\$87,9 miliar menjadi US\$107,1.<sup>38</sup> Dengan demikian Jepang merupakan mitra ekonomi terbesar bagi ASEAN dengan mengambil 12,4% dari perdagangan total ASEAN.

Namun, meningkatnya angka perdagangan ini tidak dibarengi dengan naiknya arus investasi langsung dari Jepang. Bahkan selama periode 2006 sampai 2008, investasi dari Jepang menurun, yaitu dari US\$10,2 miliar tahun 2006, kemudian turun menjadi US\$8,3 miliar tahun 2007 dan turun lagi sampai US\$7,1 miliar tahun 2008.<sup>39</sup>

Para pemimpin ASEAN dan Jepang telah menandatangani

(AJCEP) pada 5 Nopember 2002 di Phnom Penh dan disusul dengan *Framework for CEP* pada 8 Oktober 2003 di Bali. Pelaksanaan AJCEP, termasuk perdagangan bebas, baru dilakukan akhir tahun 2011 dengan mengingat pada tingkat ekonomi dan sektor yang sensitive di tiap-tiap negara, termasuk membolehkan kelonggaran lima tahun bagi negara anggota baru ASEAN.<sup>40</sup>

Untuk mencapai AJCEP yang komprehensif, diciptakan *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang dirancang untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral antar negara-negara Asia. EPA ini tidak hanya mencakup isu-isu terkait perdagangan, tetapi juga bidang investasi dan migrasi. Pertengahan 2008, Indonesia dan Jepang baru memulai EPA dengan membentuk komite bersama untuk menghapus bea masuk dan mengirim perawat Indonesia ke Jepang. Komite ini juga akan memonitor implementasi *Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement* (JIEPA) dan sekaligus memberikan evaluasi dan rekomendasi. Persetujuan format EPA ini bagi Indonesia adalah yang pertama disepakati, namun sudah yang keenam bagi Jepang.<sup>41</sup>

Dengan kesepakatan EPA ini, Indonesia berharap investasi Jepang bisa mencapai US\$65 miliar pada tahun 2010 serta mempertahankan investasi yang sudah ada.<sup>42</sup> Menurut Badan Koordinasi Pasar Modal

---

<sup>40</sup> Akbar, Rahadian T. (ed), *Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerjasama*, 2011, hal. 54.

<sup>41</sup> Jepang sudah terlebih dahulu menandatangani EPA dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Meksiko, dan Chile.

(BKPM), lima bulan pertama tahun 2008, investasi Jepang mencapai US\$827,9 juta walaupun ada penurunan nilai investasi dari US\$902,8 juta (2006) menjadi US\$618,2 juta (2007).<sup>43</sup>

Meskipun pada intinya JIEPA ditujukan untuk meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia-Jepang melalui liberalisasi perdagangan dan investasi, namun dalam konteks yang lebih luas kesepakatan ini memperkuat momentum integrasi ekonomi Asia Timur dan menyumbang pada kesejahteraan kawasan secara keseluruhan.

Kesepakatan EPA antara Jepang dan negara-negara ASEAN akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Skema penurunan tariff sudah dipastikan akan meningkatkan volume perdagangan dan membuka jalan bagi mitra bisnis yang strategis antara perusahaan di Jepang dan perusahaan di negara-negara ASEAN. Disamping manfaat bagi perusahaan lokal, model kerjasama tersebut juga menjadikan negara-negara ASEAN lebih menarik untuk tujuan investasi asing dari perusahaan internasional lainnya.

Skema JIEPA berbeda dengan *Free Trade Area* (FTA) karena cakupan JIEPA tidak hanya sektor perdagangan, tetapi meliputi sektor jasa, migrasi, pariwisata, standardisasi peraturan, hak kekayaan intelektual, dan yang paling penting adalah peluang investasi yang lebih besar. Dengan

demikian, strategi politik luar negeri dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Jepang dikatakan berhasil dengan berjalannya JIEPA.

### C. Strategi Investasi Jepang

Sebelum melakukan investasi ke negara lain, Jepang mengawalinya dengan pendekatan persuasif, yaitu dengan memberikan bantuan pada negara tersebut. Jepang pada tahun 1990-an merupakan negara donor terbesar di dunia. Walaupun memberikan bantuan dolar lebih besar dibandingkan negara-negara lain, dana tersebut hanya mewakili sejumlah kecil dari persentase kekayaan Jepang yang sesungguhnya. Pada tahun 2000 Jepang memberikan 0,27% produk domestik bruto (GNP, *Gross National Product*) ke negara-negara lain.<sup>44</sup>

Jepang merupakan salah satu dari lima negara penyumbang terbesar kepada IMF dan Bank Dunia. Sumbangan Jepang terhadap IMF di tahun 2001-2003 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sumbangan Jepang terhadap IMF Tahun 2001-2003**

Tahun	Nilai Investasi
2001	USD 750 juta
2002	USD 900 juta
2003	USD 1.2 miliar

Sumber: World Bank Indonesia, <http://www.worldbank.org>.

Jepang menyediakan bantuan bagi lebih dari 140 negara dan disalurkan melalui tiga cara. Cara-cara tersebut dilakukan dengan hibah bilateral, pinjaman bilateral (langsung ke negara sasaran.), dan sumbangan ke organisasi-organisasi internasional (misal, organisasi di bawah payung PBB dan Bank Dunia). Pemerintah Jepang menyediakan bantuan ke negara-negara berkembang berdasarkan pada empat prinsip yang tertera dalam Piagam Resmi Bantuan Pembangunan yang dibuat di Tokyo pada tahun 1992, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Bantuan tersebut harus memajukan pembangunan berkelanjutan,
- 2) Bantuan tersebut tidak digunakan untuk militer,
- 3) Negara-negara penerima bantuan diharuskan memberikan perhatian penuh terhadap kecenderungan pengeluaran biaya militer untuk memelihara dan memperkuat perdamaian serta stabilitas internasional,
- 4) Negara-negara penerima bantuan diharuskan memberikan perhatian penuh pada usaha-usaha terhadap demokratisasi, ekonomi yang berorientasi pasar dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Adanya kepentingan nasional Jepang yaitu di bidang ekonomi menjadikan Jepang berusaha mendorong pengusaha-pengusaha Jepang untuk melakukan

---

<sup>45</sup>*Ibid.* Reuban Sibon, diakses tanggal 18 September 2013

investasi di negara-negara yang layak atau berpotensi untuk memajukan kepentingan ekonomi Jepang.

Pada tahun 1997-1998, Jepang tidak ingin adanya krisis moneter membuat pengusaha-pengusaha Jepang mengalami stagnasi. Pasca krisis pada tahun 2000, Jepang mengeluarkan satu trilyun dolar AS untuk merangsang ekonomi para pengusaha Jepang dengan meminjamkannya kepada para pengusaha tersebut sejumlah dana yang harus digunakan untuk melakukan investasi di negara-negara Asia Tenggara.<sup>46</sup>

Dapat dipahami bahwa semakin banyak para pengusaha Jepang melakukan investasi di negara lain akan membawa keuntungan bagi negara Jepang. Dan dampak bagi negara penampung investasi akan menambah ketergantungannya dengan Jepang, dan tentu saja hal tersebut membawa keuntungan politik bagi Jepang, disamping keuntungan ekonomi.

Keuntungan politiknya adalah kredibilitas Jepang akan dipandang sehingga akses Jepang untuk melakukan pendalaman kerjasama dengan negara penerima investasi akan semakin lebar, serta *image* Jepang dihadapan negara lain akan meningkat sehingga akan membuka peluang bagi Jepang untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Di bidang ekonomi, hasil yang akan diperoleh Jepang adalah meningkatnya devisa Jepang berkat

Kebijakan pemerintah Jepang memberikan kesempatan bagi negara *partner* untuk melakukan ekspor ke negaranya (agar menarik simpatik negara penerima) juga merupakan suatu strategi Jepang guna memuluskan kepentingan nasionalnya berupa kemakmuran ekonomi.

### **1. Politik Dagang Bilateral**

Dalam mendorong liberalisasi ekonomi, Jepang lebih banyak melakukan kerjasama melalui berbagai FTA baik bilateral maupun regional, dibanding aktif dalam forum multilateral. Salah satu bentuk kerjasama yang banyak dilakoni Jepang adalah kerjasama yang dikenal dengan Economic Partnership Agreement (EPA). Secara ringkas, EPA merupakan strategi dan kebijakan perdagangan luar negeri untuk mendorong daya saing ekonomi. Tujuan utama Jepang melakukan banyak EPA dengan banyak negara adalah untuk menjamin pasokan energi dan saluran investasi jangka panjang. Bagi Jepang, keterjaminan saluran investasi akan menjadi kunci untuk mengembangkan dan menjaga modalnya. Jepang merupakan salah satu negara yang sangat maju di dektor industri manufaktur karena keunggulan sumber daya manusia, teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun tanpa jaminan ketersediaan saluran investasi, surplus ekonomi Jepang sebagai negara industri akan luntur dan akan diungguli oleh negara-negara industri baru yang memiliki ketersediaan modal.

Untuk mendukung strategi investasinya, Jepang sangat agresif

EPA sejak awal 2000-an. Negara pertama yang menandatangani EPA dengan Jepang adalah Singapura pada Januari 2002, yang kemudian direvisi pada 11 Maret 2007. Negara-negara lain yang telah menandatangani kesepakatan adalah Chili (3 September 2007), Thailand (1 November 2007), Brunei (31 Juli 2008), ASEAN (1 Desember 2008), Filipina (11 Desember 2008), Vietnam (25 Desember 2008), Mexico (17 September 2004), Swiss (Pebruari 2009), dan Indonesia (1 Juli 2008).<sup>47</sup> Di antara negara-negara yang telah bermitra dengan Jepang dalam EPA, sebagian besar adalah negara-negara yang kaya akan sumber energi, penghasil bahan baku dan bahan mentah, kecuali Singapura dan Swiss. Akan tetapi, Singapura memiliki peran yang penting bagi Jepang sebagai negara penghubung perdagangan internasional. Sedangkan Swiss menjadi signifikan untuk membentuk kerjasama ekonomi karena memiliki peran penting dalam perbankan internasional.

Untuk mendapat komoditas pendukung industrinya, Jepang sebagai negara industri maju memiliki daya tawar tinggi bagi negara mitra. Dengan pengalaman, modal dan teknologi yang menjadi keunggulannya, Jepang menawarkan dukungan pengembangan industri manufaktur di negara-negara mitra. Tawaran ini sebagai imbalan dari kesiediaan negara mitra untuk menyediakan bahan baku, bahan mentah, dan saluran investasi. Sebagai contoh, dalam kerjasama dengan

---

<sup>47</sup> Dr. Hendri Saparini, "Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA): Kerjasama Ekonomi Tanpa Strategi, dalam Martin Khor, *Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa*, Insist Press, Yogyakarta, 2010, hal. 12.

Malaysia, Indonesia dan Thailand, draf perjanjian EPA tersebut menyebut tentang kerjasama dalam peningkatan daya saing industri otomotif, komponen otomotif, logam dan baja. Di dalam kesepakatan dengan Indonesia, antara lain basic study, pelatihan, pengiriman tenaga ahli, seminar dan lokakarya.<sup>48</sup>

Kegiatan tersebut tentu bukan sesuatu yang baru dalam kerjasama Indonesia-Jepang. Sudah sejak lama Indonesia dan Jepang melakukan kegiatan kerjasama ekonomi di sektor industri manufaktur, bahkan juga pengembangan usaha kecil dan menengah. Apalagi, sejak 1980 Jepang sudah sangat agresif memberikan Official Development Assistance (ODA) kepada negara-negara yang akan dijadikan tujuan utama investasi. Dengan strategi ODA, Jepang akan mendapatkan manfaat langsung yakni menekan biaya investasi perusahaan-perusahaan Jepang di negara penerima ODA. Alasannya, dana ODA telah mengarahkan pembangunan fasilitas infrastruktur untuk mendukung bisnis perusahaan-perusahaan Jepang yang akan masuk ke negara penerima ODA. Namun, di era 2000-an, strategi perdagangan dan investasi internasional Jepang telah bergeser dan lebih menekankan pada strategi kerjasama FTA dan EPA, bukan lagi mengandalkan ODA.

Dengan strategi yang matang, dukungan pengembangan bagi industri negara-negara mitra pada akhirnya juga akan menguntungkan

---

<sup>48</sup> Hendri Saporini, dalam Martin Khor, *ibid.*, hal 13.

Jepang. Saran untuk mengembangkan industri di negara-negara mitra, pada dasarnya juga bertujuan untuk mendorong negara-negara mitra menjadi pemasok dan penyedia pasar yang efisien bagi bisnis dan industri. Jepang. Karena kemampuan teknologi dan kepemilikan sumber daya yang relatif sama, negara-negara mitra Jepang tersebut harus bersaing satu sama lain, sementara Jepang bisa mendapat manfaat yang optimal dari persaingan di antara mitra tersebut.

Kerjasama ekonomi JIEPA disepakati pada tanggal 20 Agustus 2007 dan berlaku efektif pada 1 Juli 2008. Berbeda dengan kerjasama ekonomi sebelumnya, kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam kerangka JIEPA ini merupakan lompatan kerjasama ekonomi dengan cakupan yang sangat luas. Tidak sekedar melakukan percepatan perdagangan bebas lewat penurunan tarif bea masuk sebagaimana dilakukan dalam WTO. Tetapi, bentuk kerjasama EPA dilakukan untuk mendorong dan menjamin kegiatan kebebasan lalu-lintas uang, barang, tenaga kerja, jaminan penyediaan barang bagi pemerintah, dan terutama kegiatan investasi, bahkan kerjasama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.<sup>49</sup>

#### **D. Politik-Kemampuan Jepang di Kawasan Asia Pasifik**

Kemampuan dan kemajuan ekonomi yang dicapai Jepang telah membuat Jepang menjadi negara yang makmur dengan cadangan devisa yang besar. Demi mempertahankan kemajuan ekonominya tersebut, Jepang masih

memerlukan “payung keamanan” dari AS, mengingat hubungan Jepang dengan beberapa negara kawasan Asia Timur yang masih terdapat benih-benih ketidakserasian. Jepang masih melihat beberapa kerawanan yang terdapat di Asia Timur yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan karena berbagai faktor, antara lain masih adanya persaingan ideologi yang melibatkan Korea dan Cina, masih adanya negara-negara yang mempunyai *dispute* teritorial serta negara-negara yang terpecah karena persaingan ideologi. AS juga masih menempatkan pasukannya di wilayah Korea Selatan dan Jepang. Demikian juga dengan kehadiran Rusia sebagai negara besar lainnya, yang dapat menambah kerawanan kawasan yang tentu saja dapat berpengaruh terhadap stabilitas kawasan Asia Timur.

Jepang pun mengkhawatirkan bahwa krisis yang masih terjadi di Semenanjung Korea dalam kaitan dengan kemampuan nuklir Korea Utara akan berakibat langsung terhadap stabilitas dan keamanan di Asia Timur karena dapat berlanjut menjadi persaingan persenjataan nuklir antara negara-negara se-kawasan (Korea Selatan, Taiwan, dan kemungkinan Jepang).<sup>50</sup>

Menurut persepsi Jepang, bahwa keadaan stabilitas politik dan keamanan di wilayah di Asia Tenggara akan ikut dipengaruhi oleh aktivitas tindakan-tindakan terror yang dilakukan oleh organisasi teroris dan organisasi-organisasi ekstrimis lainnya, yang menurut penglihatan Jepang sudah terbukti melakukan infiltrasi ke beberapa negara Asia Tenggara, misalnya Al-Qaeda yang telah terbukti mengadakan latihan-latihan “militer” dengan sasaran

mengganggu AS dan sekutunya, termasuk Jepang.<sup>51</sup> Karena itu, Jepang berusaha terus membina hubungannya dengan negara-negara ASEAN, selain terus berusaha sejauh mungkin tidak menciptakan konflik dengan RRC dan Korea Selatan. Sikap RRC dalam kaitannya dengan masalah Taiwan merupakan perkembangan yang selalu diikuti oleh Jepang yang dalam hal ini Jepang sangat berharap sengketa RRC-Taiwan tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas politik dan keamanan di Asia Timur, walaupun Jepang pada dasarnya masih melihat kemampuan militer yang dimiliki RRC sebagai “ancaman” terhadap stabilitas kawasan Asia Timur.<sup>52</sup>

Jepang merupakan negara yang mampu menjaga keamanan dalam negerinya. Keamanan dalam negeri Jepang yang terjamin membuat pemerintah Jepang mampu berkonsentrasi untuk terus mengembangkan ekonominya. Diketahui bahwa sejak peristiwa Hiroshima-Nagasaki, Jepang mengalami kehancuran. Kehancuran tersebut dapat segera diatasi Jepang melalui kerjasama dengan berbagai negara lain.

Dalam kaitannya antara keamanan dengan kepentingan ekonomi, Jepang pun melakukan kerjasama keamanan dengan berbagai negara. Kerjasama keamanan dengan negara lain tersebut antara lain dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat meningkatkan kerjasama keamanan di Selat Malaka, sesuai dengan kesepakatan kerjasama maritim kedua

Marsekal Djoko Suryanto dengan Kepala Staf Angkatan Laut Jepang, Admiral Eiji Yoshikawa, di Markas Besar TNI di Cilangkap. Kerjasama keamanan kedua negara terkait Selat Malaka sangat penting, mengingat Selat Malaka adalah jalur perdagangan Jepang dengan negara Barat dan Asia Tengah.

Peran Jepang dalam keamanan di Selat malaka sangat penting mengingat selat tersebut merupakan selat terpadat di dunia. Atas dasar itu, Eiji Yoshikawa mengatakan untuk sepakat dalam meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka. Kerjasama keamanan kedua negara tersebut sangat penting, mengingat posisi Indonesia yang juga sangat strategis bagi kepentingan ekonomi Jepang. Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Fukushiro Nugaka saat berkunjung ke Indonesia dengan mengatakan "Jepang sangat menghormati kerjasama